

Konsep Soekarno Tentang Naskom

Yulianus Mekei

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas PGRI Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Indonesia

Email: yulianusmekei@gmail.com

Abstrak

Artikel dengan Judul “Konsep Soekarno Nasakom” Merupakan sebuah pikiran dari Soekarno. Ideologi Nasionalisme, islamisme, dan Marxisme yang kemudian dikenal dengan NASAKOM Merupakan tiga konsep gerakan Pra kemerdekaan yang ditulis oleh Soekarno pada Tahun 1962. Hanya elemen yang terpenting dari Marxisme yang diambil Soekarno yaitu metode berpikirnya yang kemudian disebut dengan historis (Sejarah) materialisme dan diramu dengan dua elemen yang mengandung aspek modernitas. Hal tersebut dianggap Soekarno diperlukan bagi Bangsa Indonesia. Dari beberapa kutipan pendapat Soekarno tentang konsep nasionalisme, islamisme dan marxisme dapat diketahui bahwa ia berusaha mencari titik temu dari ketika ideologi tersebut agar menjadi suatu kekuatan dalam mencapai persatuan. Ide ini kemudian dijadikan Soekarno sebagai alat perjuangan untuk mendirikan NKRI. Hal tersebut sebaiknya dikupas cukup mendalam pada pembelajaran Sejarah Khususnya di sekolah menengah atas. Pemikiran Soekarno tentang Nasakom yang tercantum pada buku teks Sejarah SMA hanya sekilas sehingga dapat menimbulkan salah tafsir tentang Soekarno dan Pemikirannya.

Kata Kunci: Nasionalis, Agama, Komunis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Konsep Soekarno Naskom merupakan hasil buah pikiran Presiden Soekarno yang dijadikan sebagai gagasan pemersatu Bangsa Indonesia dengan tujuan melanjutkan revolusi kita yang belum selesai dengan berpedoman pada Pancasila. Naskom merupakan singkatan dari Nasionalisme, Agama dan Komunisme meskipun sebelumnya pada Tahun 1920-an Presiden Soekarno menyebutkannya dengan persatuan antara Nasionalisme, Islam dan Marxisme yang digunakan dalam melawan Imperialisme dan Kolonialisme Penjajah. Gagasan Naskom dan Proses Penyisipan Misi Nasakom (Nasakomisasi) dikeluarkan pada masa Demokrasi Terpimpin yang terkandung dalam Pidato yang selanjutnya dikenal sebagai Manipol USDEK. Ketika munculnya Periode Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno muncul sebagai Tokoh Pemimpin yang merupakan pusat kekuasaan untuk mencerminkan konsep “Terpimpin” dalam Penamaan Demokrasi Terpimpin tersebut. Menurutnya, Demokrasi Terpimpin ialah suatu Demokrasi yang dipimpin, dalam hal ini ialah Presiden Soekarno sebagai pusat kekuasaan yang harus diikuti oleh Rakyat. Oleh sebab itu semua gagasan yang ia keluarkan pun harus diikuti dan dijadikan Ideologi Bersama Termasuk ideologi Nasakomnya. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno mulai memberi penekakan pada gagasannya yang kini dinamakan Nasakom. Tampaknya, gagasan ini mengandung makna bahwa PNI (untuk Nasionalisme), NU (untuk Agama), dan PKI (untuk Komunisme), agar dapat bersama-sama berperan dalam Pemerintahan di segala tingkatan, sehingga menghasilkan suatu sistem yang antara lain akan didasarkan pada Koalisi kekuatan-kekuatan politik yang berpusat di Jawa (Ricklefs, 2008: 556).

Kajian Teori Nasakom

Memiliki dua Makna: makna pertama menunjukkan teori sebagai Pemikiran Spekualitas tentang bentuk dan tata cara pengaturan masyarakat ideal, makna kedua menunjukkan pada kajian sistematis tentang segala kegiatan dalam masyarakat untuk hidup dalam kebersamaan. contoh teori politik yang merupakan pikiran spekualitatif adalah teori politik marxis-Leninis atau komunisme, contoh lain adalah teori politik yang berdasarkan pada pemikiran adam smith kapitalisme. Pemikiran Tan Malaka dalam tulisannya Madilog Merupakan contoh diajukan soekarno merupakan contoh lain. sedangkan teori politik sebagai hasil kajian empirik bisa dicontohkan dengan teori struktural- fungsional yang di ajukan oleh Talcot Parcon (seorang Sosiolog), antara lain diturunkan kedalam teori politik menjadi Civic Culture. konsep sistem politik sendiri merupakan ciptaan para Akademisi yang mengkaji keidupan politik sesungguhnya diturunkan dari konsep sistem sosial.

Metodologi Pemikiran Soekarno sejarah Marhaenisme

Marhaenisme adalah salah satu pemikiran yang dihasilkan oleh Soekarno setelah ia melihat realitas sosial, ekonomi dan masyarakat di Nusantara yang dijajah oleh Belanda. Marhaenisme adalah sebagai ideologi perjuangan, dan bukan sebagai filsafat. Secara khusus, Soekarno tidak pernah menguraikan apa yang dinamakan Marhaenisme dalam satu tulisan atau satu buku yang memang benar-benar membahas tentang Marhaenisme. Pada 4 juli 1927, Soekarno, dengan dukungan enam kawan dari *Aglemeene Studie Club*, mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai baru ini adalah partai yang menggunakan pertama kali Marhaenisme sebagai asas politiknya. Dengan asas itu, PNI berhasil menggerakkan kaum Marhaen Indonesia yang meliputi hampir 90 persen rakyat untuk menggoyangkan kekuasaan kolonial Belanda. Uraian mengenai Marhaenisme tersebar dalam berbagai tulisan dan istilah Marhaen juga sudah ada pada waktu Indonesia Menggugat Dari berbagai tulisan mengenai Marhaenisme, salah satu yang menjadi rujukan adalah tulisan Soekarno dalam *Fikiran Ra'jat* pada tahun 1933 dengan judul *Marhaen dan Proletar* yang pada akhirnya dimuat dalam kitab *Dibawah Bendera Revolusi (DBR)* Jilid me. Tulisan tersebut mengulas hasil Konferensi Partai Indonesia (Partindo) di Mataram pada Tahun 1933. Adapun butir hasil konferensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Marhaenisme, yaitu sosio-nasionasionalisme dan sosio-demokrasi.
2. Marhaen yaitu kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain.
3. Partindo memakai perkataan Marhaen, dan tidak proletar, oleh karena perkataan proletar sudah termaktub di dalam perkataan Marhaen, dan oleh karena perkataan proletar juga diartikan bahwa kaum tani dan lain-lain kaum yang melarat tidak termaktub di dalamnya.
4. Karena Partindo berkeyakinan, bahwa di dalam perjuangan, kaum melarat Indonesia lain-lain itu harus menjadi elemen-elemennya (bagian-bagiannya), maka partindo memakai perkataan Marhaen itu.
5. Di dalam perjuangan Marhaen itu, Partindo berkeyakinan, bahwa kaum proletar mengambil bagian yang besar sekali.
6. Marhaenisme adalah azas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri yang di dalam segala halnya menyelamatkan Marhaen.
7. Marhaenisme adalah pula cara perjuangan untuk mencapai susunan masyarakat dan susunan negeri yang demikian itu, yang oleh karenanya, harus suatu cara perjuangan yang revolusioner.
8. Jadi marhaenisme adalah cara perjuangan dan azas yang menghendaki hilangnya tiap-tiap kapitalisme dan imperialisme.
9. Marhaenis adalah tiap-tiap orang bangsa Indonesia, yang menjalankan marhaenisme.

Perkataan Marhen didapatkan ketika Soekarno berkeliling mengayuh sepeda tanpa tujuan, sambil berpikir. Tiba-tiba Soekarno telah sampai di bagian selatan kota Bandung di wilayah pertanian yang padat di mana para petani bekerja di sawahnya yang sempit, dengan kurang dari sepertiga hektar. Gambaran yang khas ini membuat Soekarno ingin manjadikannya sebagai perlambang dari rakyatnya. Seorang Marhaen adalah orang yang memiliki alat produksi yang sedikit, orang kecil dengan milik kecil, dengan alat-alat kecil, sekedar cukup untuk dirinya sendiri. Kaum Marhaen yang puluhan juta jiwa, yang sudah dimelaratkan, bekerja bukan untuk orang lain dan tidak ada orang bekerja untuk dia. Tidak ada penghisapan tenaga seseorang oleh orang lain. Marhenisme adalah Sosialisme Indonesia dalam praktik. Marhaenisme adalah lambang dari penemuan kembali kepribadian nasional Indonesia. Begitu pun nama tanah air Indonesia harus menjadi lambang. Perkataan 'Indonesia' berasal dari seorang ahli purbakala bangsa Jerman bernama Jordan, yang belajar di negeri Belanda. Studi khususnya mengenai rangkaian kepulauan Indonesia. Karena kepulauan ini secara geografis berdekatan dengan India, dia menamakan 'Kepulauan dari India'. *Nesos* adalah bahasa Yunani untuk perkataan pulau-pulau, sehingga menjadi *Indus-nesos* yang akhirnya menjadi Indonesia. Masyarakat Indonesia masih merupakan masyarakat yang miskin dan feodal. Mayoritas rakyat Indonesia adalah para petani kecil. Marhaenisme menginginkan sebuah masyarakat yang adil dan bahagia. Dengan demikian, marhaenisme adalah ajaran yang berjuang untuk mencapai masyarakat semacam itu, yaitu masyarakat sosialis yang sesuai dengan prinsip *gotong-royong*. Dalam pidato pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebutkan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, sebagai bagian dari Trisila bersamaan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pidato tersebut, Soekarno menawarkan Trisila atau Ekasila, yaitu gotong royong sebagai alternatif dari Pancasila untuk digunakan sebagai landasan dasar filosofis (*philosophische grondslag*) dari Indonesia yang merdeka. Cita-cita Marhaenisme hanya bisa diwujudkan dalam sebuah negara demokratis yang merdeka. Oleh karena itu, perjuangan Marhaenisme didasarkan atas demokrasi sosial dan menolak semua bentuk kediktatoran.

Tema-tema Pokok dalam Marhaenisme

Dengan mengambil hasil kongres Partindo tahun 1933, di mana Soekarno menyatakan persetujuannya terhadap butir-butir tersebut di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pokok pikiran dan tema utama dalam Marhaenisme adalah sebagai berikut:

1. Doktrin pokok dari Marhaenisme adalah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Tujuan dari Marhaenisme adalah menghilangkan kapitalisme dan imperialisme.
2. Basis massa perjuangan Marhaenisme adalah kaum buruh (proletar), petani kecil, dan kaum yang tertindas secara ekonomi.
3. Bidang perjuangan Marhaenisme adalah pada bidang ekonomi, sosial-budaya dan politik.
4. Marhaenisme merupakan azas sekaligus cara perjuangan.
5. Marhaenisme bersifat revolusioner.

Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi

Tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, Soekarno mencoba menguraikan dan merunut pemikirannya mengenai apa yang dimaksudkannya sebagai sosio-nasionalisme dengan sosialisme atau mengaitkan sosialisme. Untuk menguraikan kedua hal tersebut, harus terlebih dahulu menguraikan satu persatu apa itu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Soekarno menggunakan kata nasionalisme merujuk pada istilah yang juga digunakan oleh para ahli dari Eropa Barat, seperti Ernest Renan, Otto Bauer maupun Karl Haushofer. Nasionalisme diartikan sebagai paham kebangsaan, yaitu paham, pendapat, atau pikiran yang menghendaki adanya kehidupan bersama di antara sekelompok individu yang menganggap diri mereka

memiliki suatu identitas yang menjadi sebab dari adanya kemauan untuk hidup bersama dan menjadi sebab pula dari perbedaan dengan kelompok individu yang lain. Selanjutnya Bung Hatta memilah-milah kebangsaan dalam 3 (tiga) kategori: kebangsaan cap (para) ningrat, kebangsaan cap (para) intelektual, dan kebangsaan cap rakyat. Kategorisasi dalam berbagai cap tersebut didasarkan pada kriteria siapa yang memiliki kekuasaan dan kepentingan siapa yang didahulukan dalam Indonesia merdeka. Nasionalisme Indonesia adalah kebangsaan cap rakyat. Maka dari itu kata Bung Hatta, kebangsaan dan kerakyatan adalah sebagai dua sepasang (dua sejoli). Nasionalisme Indonesia sejawa dengan *social conscience of man* (budi nurani sosial manusia) karena Indonesia hanya satu bagian kecil saja dari dunia. Dengan begitu nasionalisme Indonesia tidak mudah terjebak dalam nasionalisme sempit atau chauvinis karena nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Maka nasionalisme Indonesia merupakan nasionalisme yang menjadi bagian dari perjuangan umat manusia di dunia untuk membebaskan diri dari penjajahan yang bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pada titik inilah nasionalisme yang ada di Indonesia menjadi Sosio-nasionalisme. Terkait demokrasi, Soekarno menekankan mengenai pendapatnya bahwa demokrasi yang ada di Indonesia bukanlah demokrasi ala Barat. Secara umum, demokrasi ala Barat yang dirujuk oleh Soekarno adalah demokrasi parlementer. Begitu pun dengan demokrasi presidensil ala Barat, khususnya pada sisi ekonomi, di mana masih terdapat ketidakadilan penguasaan sumber daya ekonomi pada demokrasi ala Barat, baik parlementer maupun presidensil. Demokrasi yang ada di Indonesia, menurut Soekarno, bukanlah demokrasi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas karena selama berabad-abad negeri Indonesia hidup dengan kebiasaan asli berupa musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan yang bermuara pada kebijakan negara dan pemerintah. Demokrasi ini adalah perundingan demokratis model Asia. Sebagai seseorang yang meyakini bahwa kekuatan terletak dalam pemerintahan atas dasar perwakilan karena Indonesia buka hanya untuk satu orang atau satu golongan tetapi Indonesia buat semua, satu buat semua, semua buat satu.

Demokrasi Indonesia tidak hanya dalam persamaan politik semata, tetapi demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi. Satu dunia baru didalam mana terdapat kesejahteraan bersama, yang berarti keadilan sosial. Hal inilah yang dinamakan sebagai sosio-demokrasi. Tentang sosialisme, kita tidak mudah mengatakan kapan sosialisme mula-mula muncul. Sebagian orang mengatakan bahwa negara kesemakmuran yang ideal seperti yang dikemukakan Plato dalam bukunya *Republika* adalah sosialis. Sosialisme berasal dari bahasa Yunani *Comrade* yang berarti saudara. Sosialisme sebagai suatu kekuatan politik yang penting dapatlah dikatakan timbul sebagai akibat dari kapitalisme industri modern. Mengenai situasi dan kondisi ekonomi yang ideal menurut Soekarno, ia merujuk pada sosialisme. Menurutnya, sosialisme adalah suatu kecukupan yang wajar yang disokong oleh dunia modern yang sudah di kolektivisasi. Sosialisme adalah aliran pemikiran ekonomi yang berakar pada pemikiran yang diungkapkan oleh Karl Marx. Dalam perkembangannya, pemikiran Karl Marx ini kemudian memunculkan pula berbagai pemikiran dan praktek ekonomi seperti Komunisme (Marxisme yang ditafsirkan dan digabungkan dengan pemikiran Lenin sehingga dikenal sebagai Marxisme-Leninisme), Anarkisme (Marxisme yang dikembangkan oleh Bakunin), Kolektivisme (Marxisme yang dikembangkan oleh Proudhon). Soekarno menggunakan marxisme sebagai *pisau analisis* atau *denk methode* (metode berpikir), khususnya mengenai Historis Materialisme, tetapi Soekarno tidak menggunakan teori perjuangan kelas dalam Marxisme. Jadi, sosialisme yang dikemukakan oleh Soekarno adalah hilangnya situasi dan kondisi penghisapan secara ekonomi, yaitu imperialisme dan kapitalisme.

Menghilangkan Imperialisme dan Kapitalisme

Soekarno menyebut kedua sistem ini *exploitation de me'homme par me'homme, exploitation de nation par nation, exploitation de state par state*. Lebih lanjut, Soekarno menyebutnya sebagai Neo-kolonialisme dan Neo-imperialisme (Nekolim). Penekanan kapitalisme, imperialisme, dan nekolim yang dimaksudkan oleh Soekarno tidak hanya yang dilakukan oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika bagian Utara, tetapi lebih kepada watak dari ketiga hal tersebut, yaitu adanya watak penghisapan dan penindasan antar manusia, bangsa maupun negara. Dalam watak hubungan penghisapandalam satu bangsa, Soekarno memperingatkan mengenai adanya kapitelisme yang dilakukan oleh bangsa sendiri. Mengenai hilangnya kapitalisme dan imperialisme, Soekarno menyebutkan bahwa sistem dan tatanan sosial kenegaraan yang terbebas dari kapitalisme-imperialisme-nekolim adalah ketika adanya suatu sistem ekonomi yang tidak ada penguasaan sumber daya ekonomi dan masyarakat hidup bahagia sebagai bagian dari dunia yang memenuhi tuntutan budi nurani kemanusiaan.

Kaum Marhaen

Soekarno merujuk istilah marhaen pada orang yang memiliki modal (alat produksi) tetapi tidak berdaya secara ekonomi dan kelompok masyarakat lain yang tertindas oleh kolonialisme. Lebih khusus lagi, Soekarno merujuk istilah marhaen pada petani pada masa kolonial belanda karena Soekarno melihat adanya penyimpangan dari praktek ekonomi yang disebabkan oleh kolonialisme yang terjadi di Indonesia.

Bidang Perjuangan Marhaenisme

Sesuai dengan perjuangannya, yaitu kaum marhaen. Maka marhaenisme mengutamakan pada bidang ekonomi. Menurut Soekarno, tipe kolonialisme-imperialisme ekonomi yang dilakukan oleh negara Eropa Barat dan Amerika Serikat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya di masing-masing negara penjajah yang kemudian mempengaruhi pula corak kolonialisme-imperialisme yang diterapkan oleh masing-masing negara penjajah di wilayah jajahannya. Sistem ekonomi kolonialisme-imperialisme yang dilakukan oleh Belanda tidak hanya berdampak pada kehidupan ekonomi bangsa Indonesia tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan budayanya.

Marhaenisme Merupakan Azas Sekaligus Cara Perjuangan

Selain sebagai azas, dalam artian sebagai kerangka teori dan pembenaran terhadap cita-cita perjuangan yang bersifat teoritik, tetapi marhaenisme merupakan cara perjuangan yang bersifat praktis. Aspek nasionalisme dalam marhaenisme yang berada dalam ruang dan waktu dimana kolonialisme –imperialisme secara fisik, ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang sedang terjadi membuat nasionalisme tersebut dapat dijabarkan menjadi suatu alat untuk mempersatukan berbagai potensi kekuatan yang ada untuk melawan sistem yang menindas. Metode perjuangan yang sering disebut *machtvorming* (pembentukan kekuatan) dan *machtsaanwending* (penggunaan kekuatan) yang kemudian mewujudkan menjadi massa aksi.

Marhaenisme Bersifat Revolusioner

Karena tujuan marhaenisme adalah menggantikan sistem yang ada, dalam hal ini adalah kapitalisme-kolonialisme-imperialisme, maka marhaenisme bersifat revolusioner. Perubahan yang di inginkan oleh marhaenisme tidak hanya perubahan yang sifatnya hanya pada tingkat perbaikan thesis (*fenomena*) atau tambal sulam melainkan perubahan yang diinginkan pada tingkat asumsi dasar dan menyeluruh (radikal). Soekarno menyatakan bahwa hakikat revolusi adalah perubahan yang mendasar (*umgestaltung von grund aus*).

Persoalan Lanjutan

Hal lain yang perlu didiskusikan dan dikaji dengan seksama adalah mengenai hubungan antara apa yang disebut sebagai marhaenisme dengan Pancasila. Dalam pidato 1 juni 1945, soekarno menyatakan mengenai Trisila yang mengandung unsur marhaenisme. Sedangkan dalam tulisan mengenai hasil kongres Partindo tahun 1933, sebagaimana telah disinggung di atas, soekarno tidak memasukkan unsur Ketuhanan sebagai bagian dari Marhenisme. Lalu, bagaimana hubungan kedua hal yang merupakan hasil pemikiran soekarno ini? Hal inilah yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai anak ideologis Soekarno.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pemikiran politik Soekarno khususnya tentang Komunisme pasca parlementer dibubarkan (1959-1966). Penulis menggunakan dua metode untuk menjelaskan pemikiran politik Soekarno, pertama metode subjektif, yaitu telaah terhadap kepribadian Soekarno dan bagaimana konteks kehidupan Soekarno sebelum menghasilkan pemikirannya, selanjutnya metode Objektif, yaitu telaah terhadap hasil pemikirannya dan bagaimana pergumulannya dengan lingkungan sekitar. Berdasarkan kedua metode di atas, maka dalam hasil penelitian dan pembahasan ini Penulis membagi bab ini kedalam dua Sub-tema besar. Sub-bab pertama akan membahas tentang latar belakang dan konteks yang mendasari lahirnya pemikiran politik Soekarno mengenai Nasakom.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian konsep Pemikiran Politik Soekarno Tentang Nasakom, penulis menarik kesimpulan bahwa Soekarno Sebagai Seorang pemikir merupakan tokoh yang Eklitik¹³¹ dan juga merupakan seorang yang Sinkretis¹³². Soekarno mencoba menyerap beberapa gagasan ilmiah dari konsep Nasionalisme, Islam, dan Marxis yang merupakan pergerakan Dominan di tahun 1920 hingga 1966 menjadi alat analisisnya untuk melihat kondisi sosial masyarakat Indonesia (Hindia Belanda) yang jauh dari kata makmur dan menurutnya disebabkan oleh Kapitalisme Imprealisme yang digerakkan oleh kaum penjajah Eropa. Melalui bacaan-bacaan, diskusi dan pengalamannya selama menempuh pendidikan di Surabaya maupun Bandung. Soekarno menarik kesimpulan Bahwa kemerdekaan dan revolusi Indonesia baru akan tercapai ketika dua konsep besar yang mempengaruhi pergerakan Indonesia yaitu Islam dan Marxisme dipersatukan kedalam Konsep Nasionalisme. Artinya kepentingan bangsa harus diletakkan diatas kepentingan golongan-golongan lainnya baik itu agama maupun paham-paham lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Echols, Jhon M. Shadily, Hassan (1989), Kamus Indonesia Inggris: An Indonesia-English Dictionary (edisi ke-3 Jakarta: PT Gramedia, ISBN 979-4037567)
- Fiend, T (2003). Indonesia Destinies. Harvarh University Press. HLM. 25, 82-83 ISBN 0-674-01137-6
- Ricklefs, M.C. (1991). A History of Modern Indonesia Since C. 1300 (edisi ke-2) MacMillan. HLM. 268. ISBN 0-333-57689-6 LCCN 94102636. OCLC 30320024 OL 1135607. ISBN 0-33357690-X. alternate Version at google books with preview
- Vickers, Adrian (2005). A History of Modern Indonesia. Cambridge University Press hlm. 146. ISBN 0-521-54262-6
- Arif Zulkifli, dkk. 2010 Seri Buku Tempo Bapak Bangsa: Sukarno-Paradoks Revolusi Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia Hal 5